

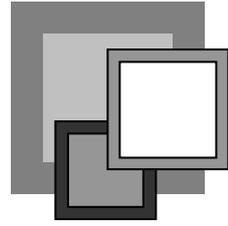


Katalog BPS : 4103.5320

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN SABU RAIJUA 2011



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KUPANG**



**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN SABU RAIJUA 2011**

No. Katalog : 4103.5320

No. Publikasi : 53032.01

Jumlah Halaman : vii + 45 halaman

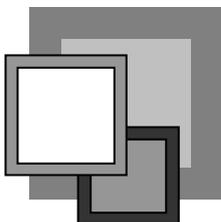
Naskah :
BPS Kabupaten Kupang

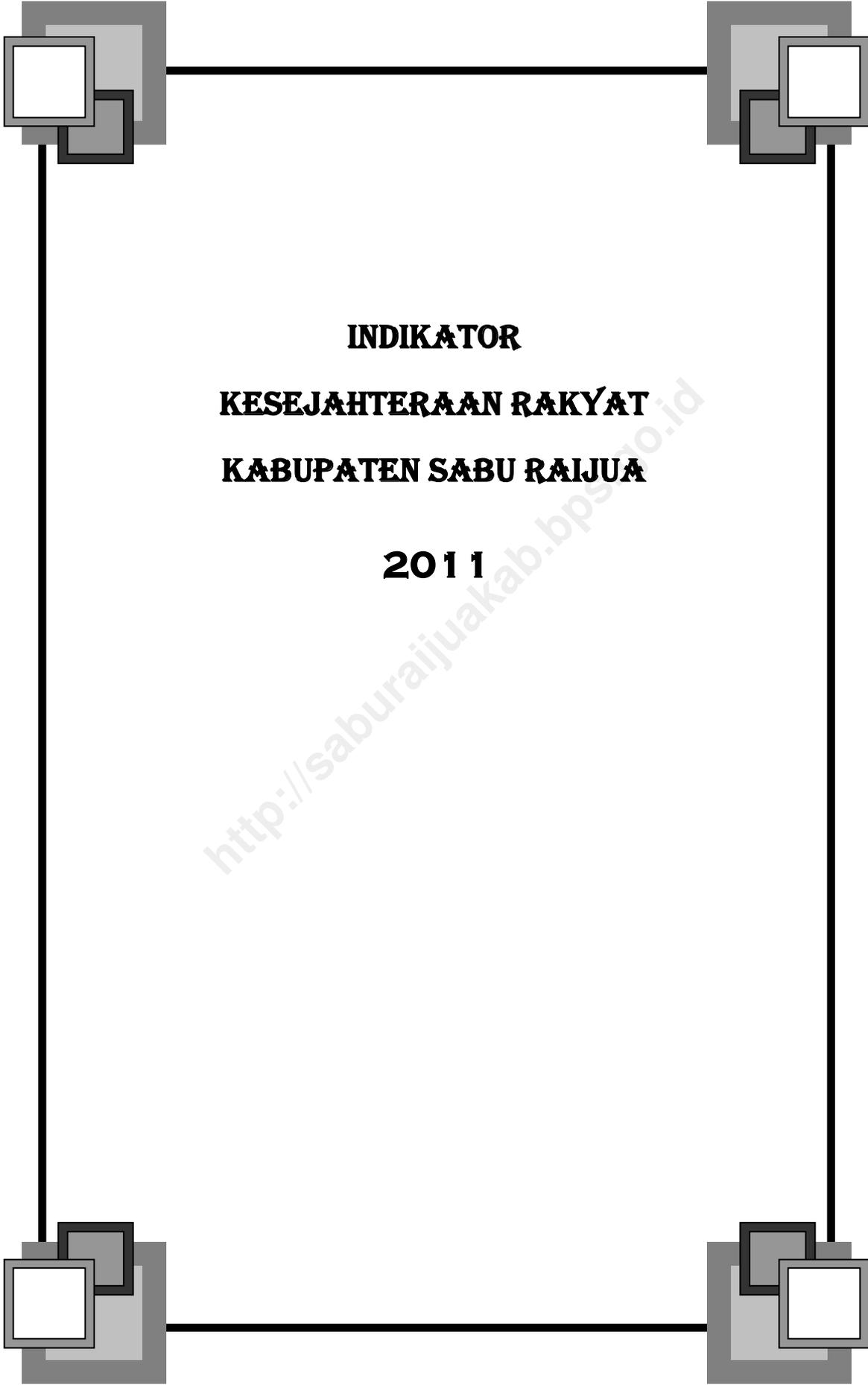
Gambar Kulit :
BPS Kabupaten Kupang

Diterbitkan Oleh :
Bappeda Kabupaten Sabu Raijua dan BPS Kabupaten Kupang

Dicetak Oleh :

Boleh Dikutip Dengan Menyebutkan Sumbernya





**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN SABU RAIJUA
2011**

<http://saburaijuakab.bps.go.id>



KATA PENGANTAR

Publikasi “*Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sabu Raijua 2011*” merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Bappeda dan BPS Kabupaten Kupang. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan beberapa indikator kesejahteraan rakyat di Kabupaten Sabu Raijua.

Dalam penerbitan ini disajikan berbagai data indikator kesejahteraan rakyat antara lain kependudukan, kesehatan dan keluarga berencana, pendidikan, perumahan dan lingkungan, serta pengeluaran dan konsumsi. Pada publikasi ini ditampilkan pula series tahun sebelumnya.

Kami menyadari bahwa publikasi ini masih mengandung banyak kelemahan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan penerbitan yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu memberikan informasi dan data sampai terbitnya publikasi ini diucapkan terima kasih.

Kupang, Juli 2011
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kupang

Drs. Marthen H. Kale, M.Si
NIP. 19550715 197702 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Ruang Lingkup.....	3
1.3. Sistematika Penulisan.....	3
1.4. Sumber Data	4
BAB II KEPENDUDUKAN	5
2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	7
2.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk	9
2.3. Komposisi /Struktur Umur	10
BAB III KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	15
3.1. Derajat Kesehatan (Morbiditas)	16
3.2. Cara Pengobatan	18
3.3. Penolong Persalinan	21
3.4. Air Susu Ibu (ASI)	23
3.5. Keluarga Berencana	24
BAB IV PENDIDIKAN	27
4.1. Angka Partisipasi Kasar	28
4.2. Angka Melek Huruf	29
4.3. Tingkat Pendidikan	30
4.4. Sarana dan Prasarana	32
BAB V PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	34
5.1. Kondisi Perumahan	36
5.2. Fasilitas Bangunan	39
BAB VI PENGELUARAN RUMAH TANGGA	43
6.1. Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan	44

DAFTAR TABEL

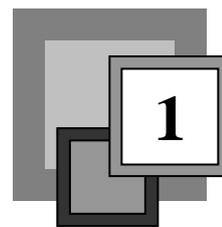
Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1.	Jumlah Penduduk Kabupaten Sabu Raijua Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin 2009	8
2.2	Rata-rata Kepadatan Penduduk Kabupaten Sabu Raijua, 2009	10
2.3	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Rasio, 2009.....	11
2.4	Penduduk Kabupaten Sabu Raijua Menurut Kelompok Umur, 2010.....	12
2.5	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Kabupaten Sabu Raijua, 2009.....	14
3.1	Persentase Penduduk Kabupaten Sabu Raijua Menurut Ada Tidaknya Keluhan Kesehatan, 2009.....	17
3.2	Persentase Penduduk Kabupaten Sabu Raijua yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin dan Lamanya Merasa Terganggu dalam Sebulan, 2009.....	18
3.3	Persentase Penduduk yang Mengalami Gangguan Kesehatan Selama Sebulan yang Lalu Menurut Jenis Kelamin dan Cara Pengobatan di Kabupaten Sabu Raijua, 2009.....	19
3.4	Persentase Bayi Menurut Penolong Persalinan Terakhir dan Jenis Kelamin Kabupaten Sabu Raijua,2009.....	22
3.5	Persentase Balita yang Disusui dan Tidak Disusui Kabupaten Sabu Raijua, 2009.....	23
3.6	Persentase Balita yang Disusui Menurut Lamanya Disusui Kabupaten Sabu Raijua, 2009.....	24
4.1	Angka Partisipasi Kasar Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Sabu Raijua, 2009	29
4.2.	Angka Melek Huruf Penduduk 10 Tahun ke Atas di Kabupaten Sabu Raijua, 2009	30

4.3.	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2009	31
4.4.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Sabu Raijua, 2010	32
4.5.	Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid Sekolah Kabupaten Sabu Raijua, 2010	33
5.1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Kabupaten Sabu Raijua, 2009.....	38
5.2.	Persentase Penggunaan Fasilitas Air Minum oleh Rumah Tangga Kabupaten Sabu Raijua, 2009.....	39
5.3.	Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja Kabupaten Sabu Raijua, 2009.....	41
6.1.	Persentase Pengeluaran Rata-Rata Perkapita menurut Golongan Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Kabupaten Sabu Raijua, 2009.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Persentase Penduduk Kabupaten Sabu Raijua Menurut Kecamatan, 2009.....	9
2.2	Piramida Penduduk Kabupaten Sabu Raijua, 2010.....	13
3.1	Persentase Penduduk yang Mengobati Sendiri Selama Bulan Referensi Menurut Jenis Obat yang Digunakan di Kabupaten Sabu Raijua, 2009.....	19
3.2	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Fasilitas Kesehatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sabu Raijua, 2009.....	21
3.3	Persentase Penduduk Wanita Usia 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Menurut Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan, 2009.....	25
5.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal Kabupaten Sabu Raijua, 2009.....	36
5.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap yang Digunakan Kabupaten Sabu Raijua, 2009.....	37
5.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding yang Digunakan Kabupaten Sabu Raijua, 2009.....	38
5.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Kabupaten Sabu Raijua, 2009.....	40
5.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Sarana Pembuangan Tinja Kabupaten Sabu Raijua, 2009	40
5.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Kabupaten Sabu Raijua, 2009.....	42

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah memastikan bahwa setiap pemerintah daerah diberikan hak dan wewenang yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur segala aspek pemerintahan mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, perhubungan, industri, perdagangan dan lainnya, dengan kata lain pemerintah daerah harus mampu mengembangkan atau meningkatkan potensi yang dimiliki serta menetapkan skala prioritas guna mensejahterakan rakyatnya.

Perencanaan pembangunan daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya-sumber daya secara bertanggung jawab.

Pembangunan yang efektif dan efisien membutuhkan perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumber daya-sumber daya publik dan sektor swasta. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah daerah dan segenap komponen masyarakatnya secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan guna merancang strategi pembangunan.

Cita-cita luhur pembangunan seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seyogyanya dalam rangka perencanaan, penentuan dan pemantauan sasaran serta penetapan kebijakan pembangunan memerlukan berbagai ukuran yang dapat mencerminkan kondisi masyarakat. Indikator-indikator sosial dapat digunakan untuk merepresentasikan pencapaian pembangunan suatu daerah, dimensi yang dicakup indikator-indikator sosial pun sangat beragam.

1.2. Ruang Lingkup dan Tujuan

Tidak jauh berbeda dengan publikasi sebelumnya, Indikator kesejahteraan rakyat ini mencakup beberapa aspek bidang kesejahteraan rakyat yang biasa diukur, antara lain bidang kependudukan, fertilitas dan keluarga berencana, kesehatan, perumahan serta pengeluaran dan konsumsi.

Publikasi ini dibuat sebagai upaya meningkatkan jenis publikasi bidang sosial. Melalui publikasi ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua.

1.3. Sistematika Penulisan

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat 2011 ini disajikan dalam enam bab, dimana setiap bab memuat suatu karakteristik sosial seperti kependudukan, kesehatan, pendidikan, perumahan dan lingkungan serta pengeluaran dan konsumsi.

Indikator-indikator kependudukan yang dibahas dalam Bab II menggambarkan jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk. Indikator kesejahteraan rakyat yang mencakup masalah kesehatan diuraikan dalam Bab III yang meliputi derajat kesehatan, penolong kelahiran, pemberian ASI dan keluarga berencana.

Indikator bidang pendidikan disajikan dalam Bab IV mencakup tingkat partisipasi sekolah, angka melek huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, rasio antara murid dan guru serta sarana pendidikan yang tersedia.

Dalam Bab V dibahas secara ringkas tentang indikator-indikator perumahan dan lingkungan, seperti jenis atap, jenis dinding, jenis lantai rumah dan fasilitas rumah lainnya. Bab VI dari publikasi ini memuat indikator tingkat kesejahteraan dilihat dari tingkat konsumsi atau pengeluaran rumah tangga.

1.4. Sumber Data

Berbagai data yang disajikan dalam indikator kesejahteraan rakyat ini diolah dari data hasil Survei Tenaga Kerja Nasional Tahun 2010 yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan dan Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2009 yang mencakup dua macam kegiatan yaitu :

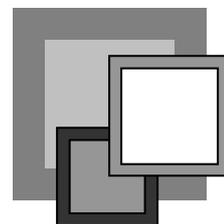
- Kelompok data pokok (KOR)
- Kelompok Data Sasaran (Modul)

Data KOR merupakan sumber data yang dimunculkan pada publikasi ini dan frekuensi pemunculannya setiap tahun sekali di mana dengan jumlah sampel yang ada, penyajiannya sementara ini baru bisa mencapai tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.

Cakupan Susenas untuk data KOR memungkinkan untuk disajikan dalam bentuk Indikator Kesejahteraan Rakyat karena:

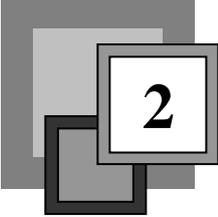
- Cakupan variabel atau karakteristik yang dikumpulkan cukup memadai untuk disajikan sebagai ukuran-ukuran yang mampu mengindikasikan kondisi kesejahteraan rakyat.
- Relevansi periode perencanaan pembangunan tahunan sesuai dengan frekuensi pengumpulan data.

KEPENDUDUKAN



<http://saburjuakab.bps.go.id>

KEPENDUDUKAN



2

Pembangunan nasional yang diselenggarakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah dan berkesinambungan merupakan usaha untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa kita. Adapun tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tentu saja diperlukan suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis agar seluruh proses pembangunan bisa berjalan sukses.

Aspek lainnya yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah aspek kependudukan. Dalam proses dan kegiatan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan karena bukan saja berperan sebagai pelaksana tetapi juga menjadi sasaran pembangunan itu sendiri. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, permasalahan penduduk tidak saja diarahkan pada upaya pengendalian penduduk tetapi juga dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang sangat besar disadari hanya akan menjadi beban pembangunan jika berkualitas rendah, apalagi jika distribusi geografis tidak merata dan komposisinya secara sosial dan budaya sangat beragam.

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, pertumbuhan penduduk di Indonesia lebih didominasi oleh tingkat pertumbuhan alamiahnya, yaitu karena kesenjangan yang cukup besar antara tingkat kelahiran yang relatif masih tinggi dibandingkan dengan tingkat kematian yang telah mengalami penurunan.

Kebanyakan di daerah khususnya yang baru akan berkembang menginginkan jumlah penduduk yang besar, hal tersebut tidak salah tetapi tidak sepenuhnya benar. Jumlah penduduk digunakan sebagai salah satu komponen dasar perencanaan pembangunan di negara kita sehingga semakin besar jumlah penduduk suatu daerah

maka bertambah besar pula 'porsi' yang diterima daerah tersebut. Akan tetapi jumlah penduduk yang dari hari ke hari, bulan ke bulan dan tahun ke tahun semakin meningkat dan sulit untuk dikendalikan akan dapat menimbulkan masalah yang serius, dan tentunya kita tidak menginginkan hal tersebut berujung pada kenyataan. Sudah menjadi rahasia umum jika berbagai masalah sosial dan ekonomi ditengarai berakar pada jumlah penduduk yang besar, jumlah penduduk yang besar mengakibatkan kebutuhan akan pangan tidak dapat terpenuhi dengan maksimal, pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan menimbulkan masalah pengangguran, puncaknya adalah kemiskinan akan merajalela. Oleh karena itu kontrol terhadap pertumbuhan penduduk harus dilaksanakan sedini mungkin, jangan menunggu berbulan-bulan atau bertahun-tahun hingga semua dampak tersebut benar-benar nyata di mata kita, perlu suatu racikan jitu berupa kebijakan-kebijakan khusus kependudukan untuk dapat mengeliminir semua dampak tersebut, karena sejatinya penduduk akan terus bertambah akan tetapi laju pertumbuhannya tetap dapat dikendalikan.

2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (migrasi). Jumlah penduduk pada dasarnya akan terus bertambah, akan tetapi jumlah penduduk yang besar jika tidak diikuti dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan menyebabkan beban bagi pembangunan. Disadari bahwa dari ketiga komponen yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat kelahiran (fertilitas) memiliki andil yang sangat besar sehingga penurunan tingkat fertilitas merupakan faktor yang penting guna menekan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan persebaran penduduk yang tidak merata.

Pada dasarnya jumlah penduduk akan bertambah terus menerus pada suatu wilayah akan tetapi pertumbuhan penduduk tersebut dapat ditekan, hal tersebut sama dengan kondisi kependudukan Kabupaten Sabu Raijua. Menurut data registrasi

penduduk tahun 2009 tercatat jumlah penduduk Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 91.870 jiwa yang terdiri dari 45.832 laki-laki dan 46.038 perempuan.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Sabu Raijua Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2009

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Raijua	5 034	4 706	9 740
02. Sabu Barat	15 936	16 513	32 449
03. Hawu Mehara	9 553	9 505	19 058
04. Sabu Timur	5 224	5 131	10 355
05. Sabu Liae	5 941	5 951	11 892
06. Sabu Tengah	4 144	4 232	8 376
Jumlah /Total	45 832	46 038	91 870

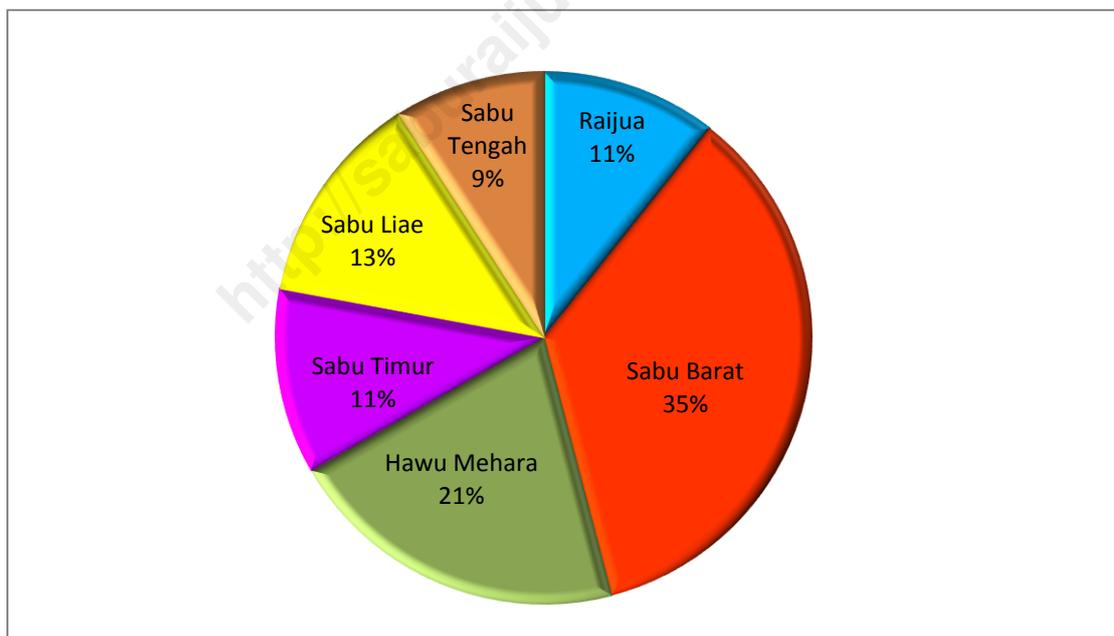
Sumber : Registrasi Penduduk 2009

Tingkat kelahiran yang masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kematian menyebabkan peningkatan jumlah penduduk di kabupaten ini. Tingkat kelahiran (fertilitas) merupakan komponen dinamika penduduk yang paling berpengaruh terhadap perubahan struktur penduduk suatu wilayah, oleh karena itu kajian yang mendalam mengenai pemahaman dinamika tingkat kelahiran masih perlu untuk dilakukan. Fertilitas memiliki peranan penting dalam berbagai studi kependudukan dengan beberapa alasan, satu diantaranya adalah angka fertilitas mempengaruhi pertumbuhan jumlah penduduk secara positif, berarti kenaikan dan penurunan fertilitas akan menaikkan dan menurunkan jumlah penduduk. Disamping itu, fertilitas yang tidak terkontrol akan menimbulkan masalah sosial politik sedangkan fertilitas yang lebih rendah daripada mortalitas mengakibatkan berkurangnya sumber daya manusia.

2.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Hingga tahun 2010 wilayah administratif Kabupaten Sabu Raijua terbagi menjadi 6 kecamatan, 5 kelurahan, 58 desa. Keseluruhan penduduk kabupaten ini terdistribusi ke dalam wilayah-wilayah tersebut. Perbedaan luas wilayah, kondisi topografi yang tidak stabil, banyaknya daerah sulit serta pertumbuhan ekonomi yang belum merata menyebabkan distribusi penduduk berbeda pada setiap kecamatan. Kondisi ini jelas berpengaruh terhadap tingkat kepadatan penduduk masing-masing kecamatan. Kecamatan Sabu Barat merupakan kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Sabu Raijua, yaitu 185,16 km² (sekitar 40,21 persen dari luas wilayah kabupaten) dengan jumlah penduduk pada tahun 2009 mencapai 32 449 jiwa atau sekitar 35 persen dari seluruh penduduk Kabupaten Sabu Raijua.

Gambar 2.1. Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua, 2009



Sumber : Sabu Raijua Dalam Angka 2011

Tidak jauh berbeda dengan Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Sabu Tengah juga memiliki wilayah yang cukup luas yaitu 78,62 km² dan penduduk yang tinggal di kecamatan ini hanya sekitar 13 % dari total penduduk kabupaten. Tingkat kepadatan di wilayah ini masih rendah dimana untuk setiap 1 km² rata-rata hanya didiami oleh 107 jiwa saja.

Kecamatan Sabu Barat memiliki proporsi penduduk terbesar di Kabupaten Sabu Raijua. Hal ini dikarenakan Kecamatan Sabu Barat merupakan titik sentral di kabupaten ini selain menjadi ibu kota kabupaten juga pusat pemerintahan, pusat perekonomian, dan pendidikan terdapat di kecamatan ini. Jumlah penduduk Kecamatan Sabu Barat Tahun 2009 sejumlah 32.449 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk mencapai 175 jiwa per km². Sementara itu kecamatan dengan jumlah penduduk terendah di Kabupaten Sabu Raijua adalah Kecamatan Sabu Tengah dengan total penduduk di tahun 2009 sebanyak 8 376 jiwa atau hanya sekitar 9 persen dari total penduduk kabupaten Sabu Raijua.

Tabel 2.2 Rata-rata Kepadatan Penduduk Kabupaten Sabu Raijua, 2009

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Raijua	39,05	9 740	249
2. Sabu Barat	185,16	32 449	175
3. Hawu Mehara	62,81	19 058	303
4. Sabu Timur	37,21	10 355	278
5. Sabu Liae	57,62	11 892	206
6. Sabu Tengah	78,62	8 376	107
Jumlah	460,47	91 870	200

Sumber : Registrasi penduduk tahun 2009

2. 3. Komposisi dan Struktur Penduduk

Komposisi dan struktur penduduk suatu wilayah sangat penting guna mengetahui perubahan jumlah penduduk secara mendetail. Komposisi dan struktur dapat berbeda jika dilihat dari jenis kelamin dan struktur umur, serta kombinasi keduanya. Kedua hal tersebut memiliki arti strategis dalam hubungannya dengan berbagai

aspek kependudukan lainnya seperti fertilitas, mortalitas dan migrasi serta masalah-masalah terkait kependudukan seperti ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan.

Sex ratio adalah indikator yang lazim dipakai untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin dengan membandingkan jumlah antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin sangat besar kaitannya dengan masalah fertilitas, dimana semakin besar porsi penduduk perempuan maka potensi fertilitas semakin tinggi.

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Rasio, 2009

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Sex Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Raijua	5 034	4 706	107
2. Sabu Barat	15 936	16 513	97
3. Hawu Mehara	9 553	9 505	101
4. Sabu Timur	5 224	5 131	102
5. Sabu Liae	5 941	5 951	100
6. Sabu Tengah	4 144	4 232	98
Jumlah	45 832	46 038	100

Sumber : Registrasi Penduduk tahun 2009

Sex ratio di level kecamatan bervariasi antara 97 hingga 107 dan di tingkat kabupaten berada pada angka 100, hal ini menandakan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Berdasarkan data diketahui bahwa sex ratio yang berada dibawah angka 100 hanya terjadi di Kecamatan Sabu Barat dan Sabu Tengah, selebihnya menunjukkan angka

diatas 100, hal ini menandakan bahwa populasi penduduk di hampir semua kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua di dominasi oleh laki-laki.

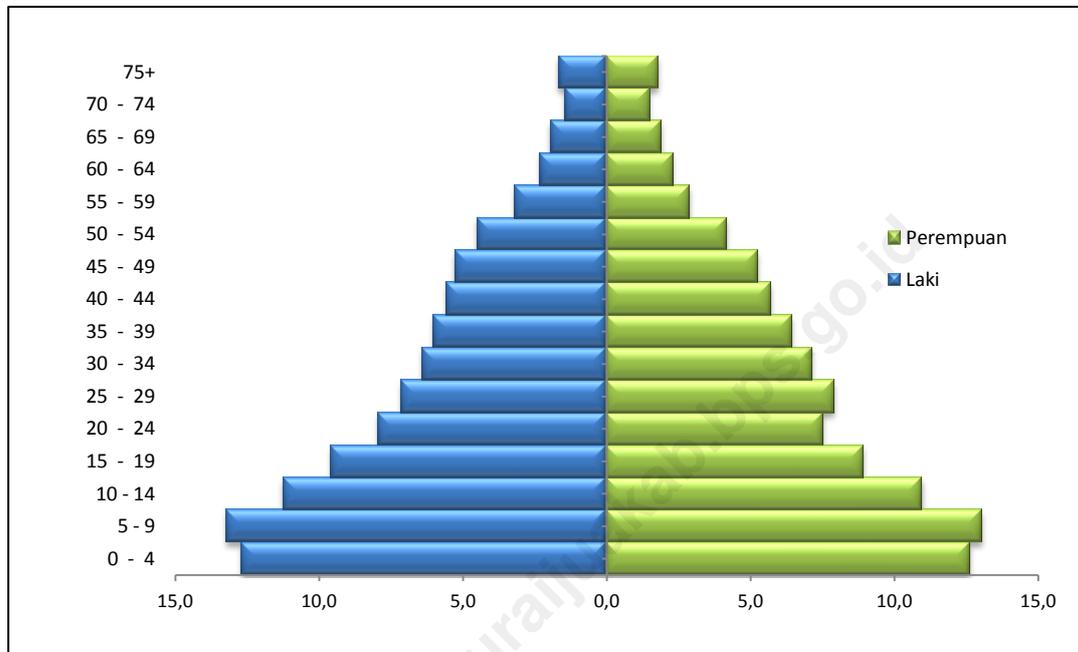
Tabel 2.4. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Sabu Raijua 2010

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	14,77	14,81	14,79
5-9	12,94	13,02	12,98
10-14	11,85	12,19	12,01
15-19	9,52	8,58	9,06
20-24	6,81	6,44	6,63
25-29	6,50	6,77	6,63
30-34	6,33	6,17	6,25
35-39	5,93	5,46	5,70
40-44	5,01	4,68	4,85
45-49	4,40	4,32	4,36
50-54	3,95	4,04	4,00
55-59	3,21	3,30	3,25
60-64	2,64	3,21	2,92
65-69	2,34	2,56	2,45
70-74	1,80	2,07	1,93
75+	1,99	2,38	2,18

Sumber : Sensus Penduduk Tahun 2010

Berdasarkan umur dan jenis kelamin, penduduk Kabupaten Sabu Raijua masih tergolong penduduk ekspansif dimana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda sebagaimana terlihat pada piramida penduduk berikut:

Gambar 2.2 Piramida penduduk Kabupaten Sabu Raijua, 2010



Sumber : Hasil Sensus Penduduk tahun 2010

Komposisi penduduk dilihat berdasarkan status perkawinan, persentase penduduk 10 tahun ke atas berstatus belum kawin sebesar 38,0 persen, kawin sebesar 53,40 persen. Sisanya adalah penduduk dengan status cerai hidup dan cerai mati yang besarnya berturut-turut 2,0 persen dan 6,5 persen.

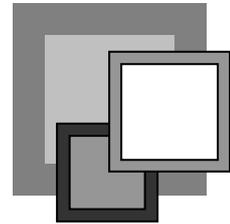
Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase laki-laki yang belum menikah lebih besar daripada perempuan. Hal ini dimungkinkan laki-laki untuk memutuskan menikah memerlukan banyak pertimbangan seperti kemampuan dalam hal ekonomi. Penduduk yang berstatus cerai mati, perempuan mempunyai persentase yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan perempuan pada usia lanjut mempunyai harapan hidup yang lebih tinggi daripada laki-laki sehingga banyak perempuan yang menjadi janda.

Tabel 2.5. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2009

Status Perkawinan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	41,1	34,9	38,0
Kawin	53,2	53,7	53,4
Cerai Hidup	0,7	3,3	2,0
Cerai Mati	5,0	8,1	6,5

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2009

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA



<http://saburajayabps.bps.go.id>

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional karena bidang kesehatan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia secara berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan terarah. Pembangunan ini merupakan upaya untuk tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar terwujud derajat kesehatan yang optimal.

Mutu pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas sarana fisik, jenis tenaga yang tersedia, obat, alat kesehatan dan sarana penunjang lainnya, proses pemberian pelayanan, kompensasi yang diterima dan harapan masyarakat pengguna. Faktor-faktor tersebut merupakan prakondisi yang harus dipenuhi untuk peningkatan mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Peningkatan pelayanan dilakukan melalui peningkatan mutu dan profesionalisme sumber daya kesehatan. Sedangkan harapan masyarakat pengguna dilakukan melalui peningkatan pendidikan umum, penyuluhan kesehatan serta komunikasi yang baik antara pemberi pelayanan kesehatan dan masyarakat.

3.1. Derajat Kesehatan

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat utamanya ditujukan untuk menekan tingginya angka kesakitan dan angka kematian dalam program pengembangan manusia Indonesia seutuhnya. Tabel 3.1 berikut menunjukkan persentase angka kesakitan, data angka kesakitan yang disajikan dalam tabel 3.1 merupakan persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan selama sebulan sebelum pencacahan yang menyebabkan terganggunya kesehatan sehari-hari.

Tabel 3.1. Persentase Penduduk Kabupaten Sabu Raijua menurut Ada Tidaknya Keluhan Kesehatan, 2009

Jenis Kelamin	Keluhan Kesehatan	
	Ada	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	50,93	49,07
Perempuan	51,26	48,74
Total	51,10	48,90

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2009

Dari tabel diatas nampak bahwa derajat kesehatan penduduk Kabupaten Sabu Raijua masih sangat rendah, dimana kurang lebih 49,07 persen penduduk laki-laki dan 48,74 persen penduduk perempuan mempunyai keluhan kesehatan. Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan di kabupaten ini mencapai 48,90 persen.

Gangguan kesehatan tidak hanya merugikan jasmani seseorang akan tetapi terdapat dampak ikutan (*multyplier effect*) yang turut mempengaruhi semua aspek kehidupan, terutama terhadap kehidupan ekonomi seseorang khususnya mereka yang bekerja, yang akhirnya menyebabkan penurunan produktifitas. Tidak itu saja gangguan kesehatan mengakibatkan peningkatan pengeluaran rumah tangga.

Dari 77,34 persen penduduk yang mengalami gangguan kesehatan terdapat sekitar 32,15 persen penduduk mengalami gangguan kesehatan kurang dari 3 hari, 9,73 persen merasakan gangguan 8 hingga 14 hari. Frekuensi tertinggi yang mengalami keluhan bagi mereka yang menderita gangguan kesehatan adalah antara 4 sampai dengan 7 hari yaitu sebesar 46,74 persen, sementara itu hanya terdapat 11,38 persen penduduk dengan keluhan kesehatan yang mengalami gangguan selama lebih dari 14 hari. Lamanya seseorang menderita suatu penyakit tergantung pada banyak hal,

beberapa diantaranya disebabkan oleh keadaan penyakit yang diderita, akses terhadap pelayanan kesehatan, serta kondisi ekonomi dan sosial budaya.

Tabel 3.2. Persentase Penduduk Kabupaten Sabu Raijua yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Jenis Kelamin dan Lamanya Merasa Terganggu dalam Sebulan, 2009

Jenis Kelamin (1)	Lamanya Menderita Sakit (hari)			
	≤3 (2)	4-7 (3)	8-14 (4)	≥15 (5)
Laki-laki	29,56	46,87	11,73	11,74
Perempuan	34,87	46,49	7,62	11,01
Total	32,15	46,74	9,73	11,38

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2009

3.2. Cara Pengobatan

Pada umumnya seseorang yang mengalami gangguan kesehatan akan merasa dirinya benar-benar sakit dan merasa perlu berobat apabila penyakit yang dideritanya telah mengganggu aktifitasnya. Biasanya mereka akan menunggu sampai berapa lama dia bisa bertahan untuk tetap beraktifitas sebelum memutuskan untuk berobat. Sudah menjadi kebiasaan bila seseorang mengalami gangguan kesehatan, ia akan berusaha terlebih dahulu mengobati sendiri penyakitnya. Setelah beberapa waktu tidak mengalami kesembuhan, barulah dia akan pergi berobat jalan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ada.

Pada 2009 diketahui bahwa terdapat sekitar 71,32 persen penduduk yang mengalami gangguan kesehatan melakukan pengobatan sendiri, sedangkan sisanya menempuh pengobatan selain yang dilakukan sendiri. Penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dengan mengobati dengan berobat jalan sebesar 45,41 persen sedangkan yang tidak berobat jalan sebesar 54,59 persen. Komposisi pengobatan yang dilakukan sendiri dan penduduk yang menjalani berobat jalan berdasarkan jenis kelamin tersaji pada tabel 3.3.

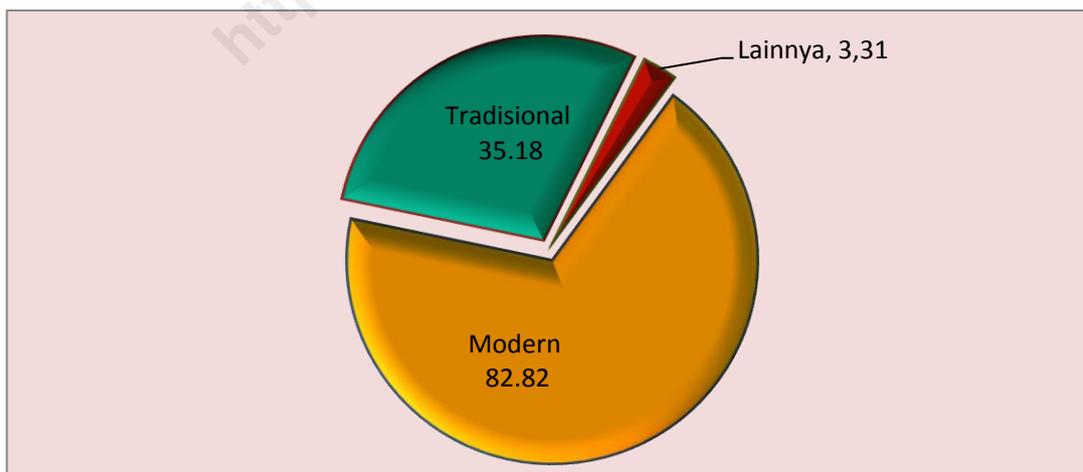
Tabel 3.3. Persentase Penduduk yang Mengalami Gangguan Kesehatan Selama Sebulan yang Lalu menurut Jenis Kelamin dan Cara Pengobatan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2009

Jenis Kelamin	Cara Pengobatan			
	Sendiri		Berobat Jalan	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	72,32	27,68	45,21	54,79
Perempuan	70,31	29,69	45,61	54,39
Total	71,32	28,68	45,41	54,59

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2009

Pada gambar 3.1. di bawah menunjukkan dari penduduk yang mengobati sendiri, 82,82 persen diantaranya menggunakan obat modern, 35,18 persen obat tradisional, dan 3,31 persen lainnya.

Gambar 3.1. Persentase Penduduk yang Mengobati Sendiri Selama Sebulan yang Lalu Menurut Jenis Obat yang Digunakan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2009



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2009

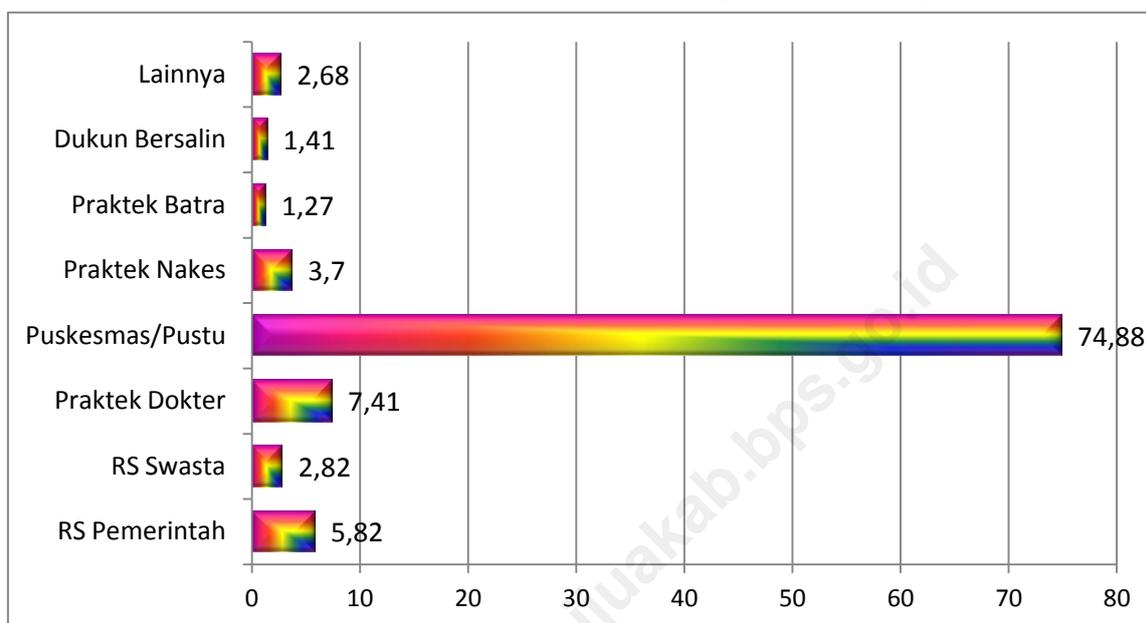
Pembangunan tidak mungkin dapat terselenggara dengan baik tanpa tersedianya salah satu modal dasar yaitu kesehatan masyarakatnya. Perbaikan mutu kesehatan masyarakat akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan kualitas sumber daya manusia yang baik dapat menjadi modal untuk membangun bangsa ke arah yang lebih maju. Kesehatan masyarakat harus menjadi acuan dalam pembangunan baik sebelum berjalan maupun sedang berjalan. Derajat kesehatan berhubungan erat dengan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungannya.

Salah satu upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah melalui pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan sehingga akan tercipta masyarakat yang sehat serta menghasilkan SDM yang cerdas dan produktif.

Kabupaten Sabu Raijua memiliki beragam fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, akan tetapi pemanfaatan fasilitas tersebut oleh masyarakat dirasakan belum optimal. Pada tahun 2009 diketahui terdapat 45,41 persen dari jumlah penduduk yang mengalami gangguan kesehatan pernah berobat jalan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memeriksakan dirinya ke berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, diantaranya adalah tingkat pendidikan, pendapatan dan asuransi kesehatan serta jarak terhadap fasilitas kesehatan. Tingkat pendidikan yang tinggi memungkinkan seseorang untuk mengetahui dan mengenali gejala dari suatu penyakit. Sehingga apabila mengalami sakit, orang tersebut dapat mengambil keputusan untuk rawat jalan atau tidak. Pendapatan jelas memberi pengaruh yang signifikan terhadap cara berobat sebab berkaitan dengan kemampuan untuk membayar suatu fasilitas kesehatan. Sementara itu dengan adanya jaminan asuransi kesehatan, seseorang yang mengalami keluhan kesehatan akan merasa lebih yakin dan tidak khawatir tentang biaya kesehatan yang mahal sehingga memungkinkan

seseorang untuk segera berobat dan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan rawat jalan.

Gambar 3.2. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua, 2009



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2009

Gambar di atas memperlihatkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang relatif banyak dimanfaatkan oleh penduduk yang berobat jalan adalah Puskesmas/Pustu (74,88%), praktek dokter (7,41%) dan RS Pemerintah (5,82%).

3.3. Penolong Persalinan

Upaya untuk mengetahui perkembangan pencapaian kesehatan suatu daerah dapat dilihat dari indikator-indikator yang representatif mengukur pencapaian tersebut. Kesehatan memang kompleks tapi sejatinya pola hidup sehat harus diterapkan sejak dini, yaitu sejak manusia berada dalam kandungan kemudian pada saat balita. Kesehatan pada saat balita bergantung pada banyak hal seperti asupan gizi, pola asuh dan kesehatan ibu. Indikator lain yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan pada saat balita adalah keselamatan pada saat persalinan yang sangat bergantung pada siapa penolong pada saat persalinan.

Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan secara teoritis lebih aman bagi kondisi kesehatan ibu dan bayi bila dibandingkan dengan persalinan yang dilakukan oleh dukun, sanak saudara atau lainnya. Pengetahuan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan serta peralatan pendukung yang lebih lengkap, modern dan terjamin kebersihannya menjadi jaminan bahwa persalinan yang dilakukan oleh mereka akan lebih baik bagi kesehatan ibu dan anaknya, akan tetapi kenyataannya masih banyak ibu hamil yang persalinannya masih tradisional. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan banyak penduduk tinggal di daerah pedesaan dan daerah sulit, tingkat ekonomi yang lemah, pendidikan warganya yang rendah, fasilitas kesehatan yang kurang memadai merupakan faktor-faktor yang menyebabkan tingkat persalinan oleh tenaga medis masih rendah.

Pada tahun 2009 mencatat 52,21 persen kelahiran bayi yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua dilakukan oleh dukun, terdapat 22,37 persen persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, yaitu 19,06 persen oleh bidan, 2,48 persen oleh dokter serta 0,83 persen oleh tenaga medis lainnya.

Tabel 3.4 Persentase Bayi Menurut Penolong Persalinan Terakhir dan Jenis Kelamin Kabupaten Sabu Raijua, 2009

Penolong Persalinan	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(4)	(5)
Dokter	2,15	2,84	2,48
Bidan	20,97	17,05	19,06
Tenaga Medis Lainnya	1,61	0,00	0,83
Dukun Bersalin	51,07	53,42	52,21
Famili/keluarga	23,67	24,42	24,03
Lainnya	0,54	2,27	1,38

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2009

3.4. Air Susu Ibu (ASI)

Masa depan suatu bangsa bergantung pada sumber daya manusia bangsa itu sendiri, SDM yang bermutu akan menjadi kekayaan suatu negara sementara SDM yang secara kuantitas banyak tetapi tidak bermutu justru akan menambah beban pembangunan bangsa, oleh karena itu peningkatan mutu SDM mutlak dilaksanakan. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa, mereka akan menjadi penentu arah pembangunan, apakah ke arah yang lebih baik atau akan mengalami keterpurukan, sehingga kualitas mereka harus diprioritaskan.

Sedini mungkin kualitas anak-anak tersebut harus ditingkatkan, pemberian asupan gizi yang cukup sejak balita bisa menjadi jalan terbaik untuk hal tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan akan gizi balita pada awal masa pertumbuhannya dapat dilakukan dengan pemberian ASI. Disamping sebagai sumber makanan, zat-zat yang terkandung dalam ASI dapat memberikan kekebalan alamiah yang tinggi pada bayi. Oleh karena itu ASI sangat penting dalam menunjang kesehatan dan kualitas hidup generasi suatu bangsa di masa yang akan datang.

Tingkat pemberian ASI pada balita di Kabupaten Sabu Raijua saat ini cukup tinggi yaitu mencapai 88,89 persen (terlihat pada tabel 3.5 di bawah ini).

Tabel 3.5. Persentase Balita yang Disusui dan Tidak Disusui Kabupaten Sabu Raijua, 2009

Jenis Kelamin	Pemberian ASI	
	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	84,15	15,85
Perempuan	93,51	6,49
Total	88,89	11,11

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2009

Berdasarkan lamanya disusui, rata lama pemberian asi cukup tinggi. Hal ini terlihat dari populasi anak yang berumur 0-59 bulan, 31,02 persen mendapat asi lebih dari 24 bulan, disusui selama kurang dari 18 bulan juga masih cukup tinggi yaitu sebesar 54,16 persen. Ideal lama menyusui yaitu selama 18-23 bulan. Lamanya balita yang pernah disusui berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6. Persentase Balita yang Pernah Disusui Menurut Lama Disusui di Kabupaten Sabu Raijua, 2009

Lama Disusui (bulan)	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<=5	0,00	0,00	0,00
6-11	4,94	7,82	6,48
12-17	45,54	49,54	47,68
18 – 23	15,83	13,92	14,82
> 24	33,69	28,72	31,02

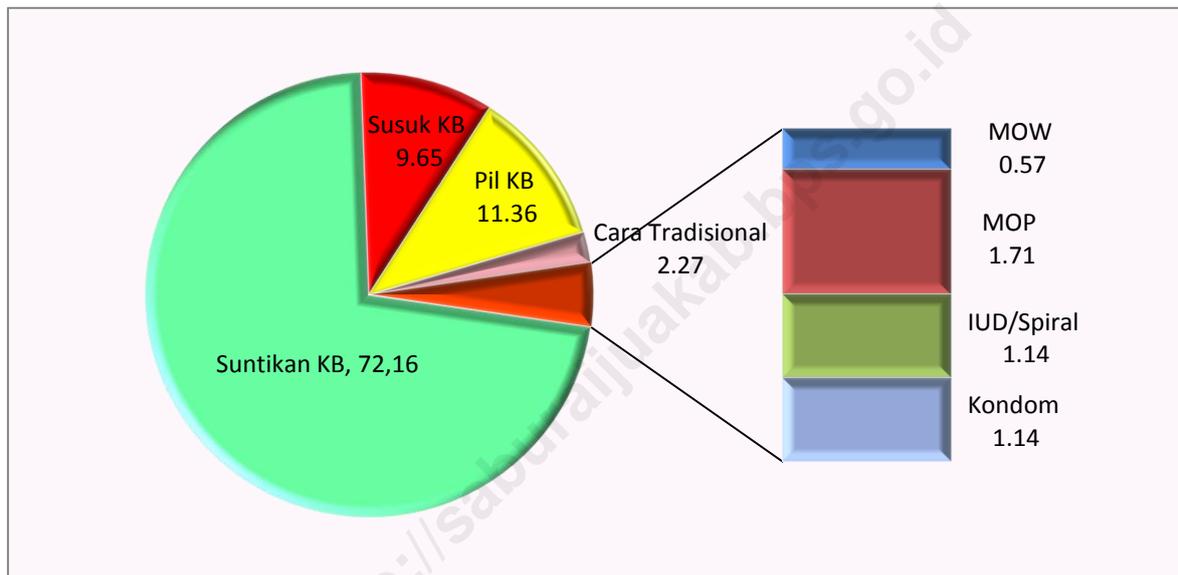
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2009

3.5. Keluarga Berencana

Seperti telah diketahui bersama bahwa Gerakan Keluarga Berencana yang awalnya dimulai dengan Program KB secara perlahan-lahan diharapkan akan menuju pada suatu kebutuhan yang sifatnya mendasar dalam suatu keluarga, yang pada akhirnya gerakan KB secara keseluruhan akan menjadi KB Mandiri. Namun sebagaimana diketahui bahwa dampak krisis ekonomi yang kemudian meluas menjadi krisis multidimensi tidak dapat dipungkiri telah memberikan dampak negatif terhadap gerakan KB yang selama ini dirasakan sangat besar manfaatnya. Kenaikan harga bahan baku pembuatan alat kontrasepsi turut memicu kenaikan harga alat KB sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh daya beli sebagian masyarakat, yang selanjutnya diduga akan berpengaruh terhadap jumlah akseptor KB.

Penduduk yang pernah menggunakan alat atau cara KB tidak selamanya akan menggunakan alat tersebut. Hal tersebut dimungkinkan bila pada saat tertentu pengguna dapat melepas atau menghentikan pemakaian KB karena beberapa faktor seperti merasa tidak cocok dengan alat/cara KB yang digunakan, ingin menambah keturunan dan alasan lainnya.

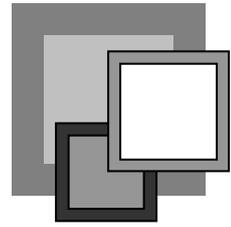
Gambar 3.3. Persentase Penduduk Wanita Usia 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Menurut Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan, 2009



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2009

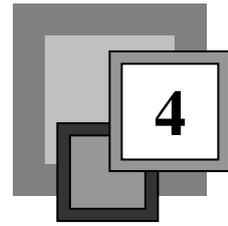
Berdasarkan alat/cara KB yang digunakan, metode KB dengan media suntik dan pil merupakan alat KB yang paling banyak diminati bagi akseptor KB, hal ini terbukti dengan tingginya persentase penggunaan kedua metode ini dibandingkan metode lainnya, yaitu berturut-turut mencapai 72,16 persen dan 11,36 persen. Susuk KB merupakan alternatif lainnya yang mendapat respon baik dari para akseptor KB, persentasenya mencapai 9,65 persen. Secara umum persentase penggunaan alat/cara KB tersaji pada gambar 3.7 di atas.

PENDIDIKAN



<http://saburajjuaka.bps.go.id>

PENDIDIKAN



Pendidikan sangat penting dalam proses pembangunan, dimana pencapaian tujuan pembangunan membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Seperti yang tercantum dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk pembangunan ekonomi. Semakin banyak orang yang berpendidikan maka akan semakin mudah bagi negara untuk membangun bangsanya. Hal ini dikarenakan telah dikuasainya keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi oleh sumber daya manusianya sehingga pemerintah lebih mudah menggerakkan pembangunan nasional. Oleh karena itu, merupakan hal yang sangat penting untuk merancang suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang dapat memenuhi tujuan tersebut diatas.

Tujuan dan arah pembangunan yang ingin diwujudkan oleh setiap negara umumnya telah dirumuskan dalam *Millenium Development Goals* (MDG's). Butir-butir kesepakatan yang tertuang dalam MDG's merupakan sebuah komitmen internasional yang disepakati oleh seluruh negara termasuk Indonesia. Hal ini setidaknya menjadikan Indonesia khususnya semua daerah yang ada di Indonesia harus mampu menterjemahkan kesepakatan tersebut melalui kebijakan dan langkah yang tepat.

Kebijakan tersebut tentunya harus dirumuskan melalui konsep perencanaan yang jelas dan tepat untuk bidang pembangunan khususnya di bidang pendidikan.

Hal yang paling mendasar dari perencanaan pendidikan adalah berbagai aktifitas kegiatan yang rasional dan sistematis bagi pencapaian tujuan dan fungsi pendidikan. Perencanaan pendidikan yang baik dan memiliki prospek kedepan yang cerah adalah manakala tujuan dan fungsi pendidikan dijadikan sebagai landasan berpijak. Oleh karena mengingat pendidikan merupakan aspek yang esensial dalam upaya mencapai tujuan pembangunan, maka perencanaan pembangunan pendidikan yang tepat dan matang mutlak diperlukan dalam membentuk sumber daya manusia yang akan menjadi modal pembangunan itu sendiri. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bertitik tolak dari pembangunan bidang pendidikan itu sendiri.

4.1. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio jumlah siswa berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk dengan kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Diharapkan setiap wilayah mampu meraih angka tuntas paripurna yang diukur dari APK yang telah mencapai 95 persen atau lebih. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Untuk Kabupaten Sabu Raijua tahun 2009, APK kelompok umur 7-12 tahun telah mencapai 94,56 persen, sementara APK kelompok umur 13-15 tahun baru mencapai 86,60 persen.

Program wajib belajar pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam keseluruhan aspek pembangunan nasional serta adaptif dalam penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), yang muaranya adalah mendekatkan pada pencapaian tujuan pembangunan nasional yakni masyarakat adil dan makmur. Akan tetapi dalam

pelaksanaannya kerap ditemukan kendala yang menghambat kemajuan pembangunan pendidikan. Faktor kemiskinan yang merupakan sebuah kenyataan sosial yang sedang menjadi perhatian pemerintah dewasa ini, merupakan salah satu kendala utama pendidikan.

Beberapa faktor diatas setidaknya memiliki potensi yang kuat untuk mempengaruhi perkembangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Sabu Raijua, Angka Partisipasi Kasar menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin di Kabupaten Sabu Raijua tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1. Angka Partisipasi Kasar Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Sabu Raijua, 2009

Angka Partisipasi Kasar	Sabu Raijua
(1)	(2)
7-12	94,56
13-15	86,60
16-18	53,11
19-24	11,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2009

4.2. Angka Melek Huruf

Persentase melek huruf diperoleh dengan menghitung besarnya persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis. Indikator ini menggambarkan mutu sumber daya manusia yang diukur dalam aspek pendidikan, semakin tinggi nilai indikator ini semakin tinggi pula mutu sumber daya manusianya. Kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya di Kabupaten Sabu Raijua tahun 2009 sudah cukup tinggi, angka melek huruf di wilayah ini mencapai angka 86,65 persen. Tabel 4.2 dibawah ini menggambarkan keadaan angka melek huruf di Kabupaten Sabu Raijua.

Tabel 4.2. Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Sabu Raijua, 2009

Kemampuan Membaca dan Menulis	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Dapat Membaca dan Menulis	88,05	85,27	86,65
Buta Huruf	11,95	14,73	13,34

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2009

4.3. Tingkat Pendidikan

Peningkatan kualitas dan moral sumber daya manusia merupakan komitmen bersama yang perlu diwujudkan oleh setiap daerah karena sumber daya manusia yang bermutu dan bermoral baik merupakan modal utama pembangunan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Upaya bidang pendidikan diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sehingga bisa menghasilkan karya yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.

Mengingat pentingnya peranan penduduk dalam pembangunan nasional, sehingga untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan diperlukan penduduk yang berkualitas, upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk dapat ditempuh melalui berbagai cara seperti pendidikan. Kualitas penduduk dapat dibagi menjadi dua yaitu kualitas fisik dan non fisik, peningkatan kualitas fisik erat kaitannya dengan kesehatan sedangkan peningkatan kualitas non fisik dapat dilakukan melalui pendidikan. Dengan peningkatan pendidikan maka sikap dan perilaku seseorang akan lebih baik dan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat.

Salah satu cara untuk mengetahui hal tersebut adalah dengan mengetahui tingkat pendidikan yang dikecap oleh penduduk suatu daerah. Indikator dalam bidang

pendidikan yang dapat menjadi ukuran besarnya peluang/kesempatan penduduk untuk mengenyam pendidikan pada jenjang formal adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan. Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk suatu daerah mencerminkan kualitas sumber daya manusia daerah tersebut. Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan mengasumsikan bahwa semakin banyak pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki seseorang yang diperoleh melalui pendidikan yang dijalannya, dengan demikian kualitas sumber daya manusia tersebut seharusnya lebih baik bila dibandingkan penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah.

Dari tabel 4.3. diketahui bahwa proporsi untuk penduduk 10 tahun ke atas tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Sabu Raijua terbesar adalah penduduk dengan tingkat pendidikan sekolah dasar sebesar 31,13 persen untuk penduduk laki-laki dan 35,77 persen untuk penduduk perempuan. Untuk penduduk usia 10 tahun keatas yang memiliki ijazah perguruan tinggi (DI s.d S3) persentasenya masih sangat kecil.

Tabel 4.3. Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2009

Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	Jenis Kelamin		Total
	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak punya	44,32	40,35	42,31
SD/Sederajat	31,13	35,77	33,48
SLTP/Sederajat	13,29	12,81	13,05
SMU	8,93	9,86	9,4
DI – DIII	0,91	0,61	0,76
DIV – S3	1,42	0,61	1,01

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2009

4.4. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan sangat menentukan dalam keberhasilan kegiatan proses belajar mengajar, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sarana dan prasarana pendidikan disini terbatas pada jumlah sekolah, guru dan murid serta indikator indikator yang dihasilkan seperti rasio murid terhadap guru dan rasio murid terhadap sekolah.

Pada tahun ajaran 2007/2010 jumlah sekolah dasar dan sederajat tercatat 66 unit dengan 12.092 orang murid dan 462 orang guru. Pada tingkat SLTP jumlah sekolah negeri dan swasta hanya 16 unit dengan jumlah murid 4.279 orang dan guru sebanyak 131 orang. Sementara itu pada jenjang SMU jumlah sekolah, guru dan murid jauh lebih sedikit dari sekolah dasar maupun SLTP/MTS, sebagaimana terlihat dalam tabel 4.5 dibawah ini.

Tabel 4.4. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Sabu Raijua, 2010

Jenjang Pendidikan	Sekolah	Guru	Murid
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/MI	66	462	12 092
SLTP/MTS	16	131	4 279
SMU/MA	5	92	2 697

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sabu Raijua

Rasio murid terhadap guru pada tingkat SD sebesar 26, artinya rata-rata satu orang guru pada sekolah dasar mengajar 26 orang murid, sementara itu tiap sekolah rata-rata menampung 183 orang murid.

Pada tingkat SLTP, rata-rata satu orang guru mengajar 32 orang murid, sedangkan daya tampung untuk sekolah SLTP rata-rata sebanyak 267 orang murid. Pada tingkat SMU/MA rasio murid terhadap guru sebesar 29 orang dengan daya tampung rata-rata

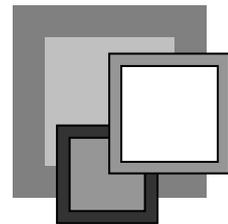
sebanyak 539 orang murid. Indikator tersebut selengkapnya seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5. Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid Sekolah Kabupaten Sabu Raijua, 2010

Jenjang Pendidikan	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
(1)	(2)	(3)
SD/MI	26	183
SLTP/MTS	32	267
SMU/MA	29	539

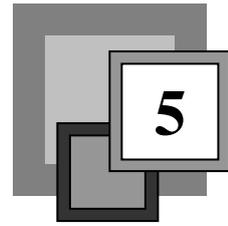
Sumber : Diolah dari Data sekunder

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN



<http://saburajjualakademi.go.id>

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN



Disamping kebutuhan pangan dan sandang, kebutuhan akan perumahan (papan) merupakan kebutuhan primer bagi setiap orang. Rumah merupakan tempat berteduh dari cuaca panas dan hujan, tempat berkumpulnya seluruh anggota keluarga, tempat menyimpan berbagai barang kebutuhan, menjadi ciri khas budaya serta berbagai kegunaan lainnya.

Sekelompok penduduk yang membangun rumah pada suatu wilayah akan membentuk lingkungan baru berupa sebuah pemukiman penduduk. Biasanya suatu komunitas penduduk yang mendiami suatu wilayah menuai berbagai masalah sebagai sebuah konsekuensi terciptanya suatu peradaban. Konsekuensi tersebut berupa masalah-masalah sosial budaya dan kependudukan seperti masalah kesehatan, sanitasi, maupun hubungan antar masyarakat.

Kebutuhan akan perumahan kian bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, terlebih di daerah-daerah perkotaan. Permasalahan yang akhirnya timbul bukan hanya bagaimana membangun perumahan penduduk, tapi juga bagaimana menyediakan lokasi pemukiman dan fasilitas sosial serta fasilitas lainnya yang tertata secara rapi agar tidak menimbulkan masalah sosial dikemudian hari.

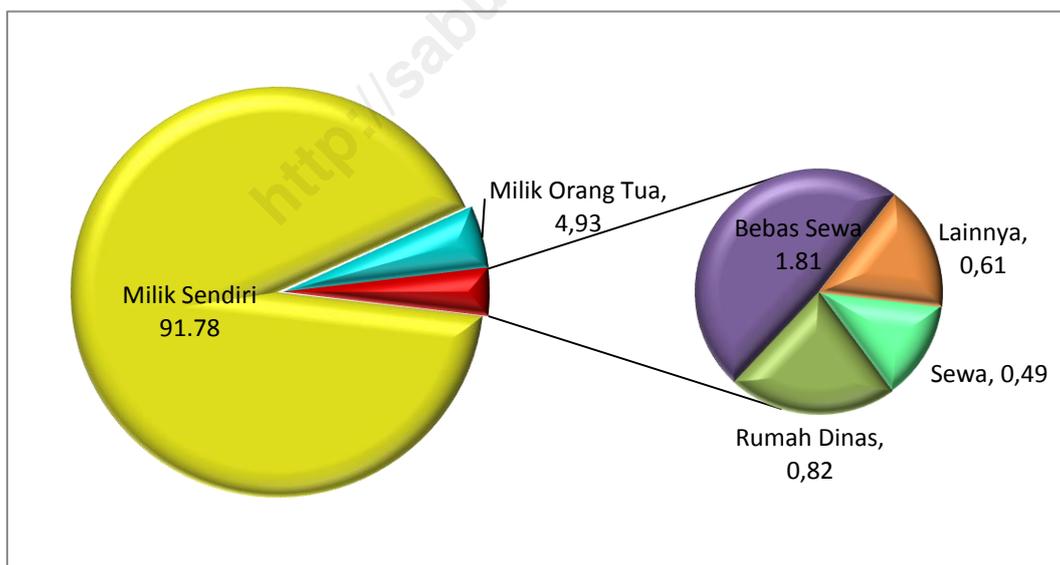
Dampak lain yang ditimbulkan oleh pembangunan perumahan yang semakin pesat adalah bergesernya penggunaan lahan yang semula digunakan sebagai lahan pertanian secara perlahan-lahan berkurang karena pemanfaatannya dialihkan menjadi daerah pemukiman, sehingga akan berdampak negatif pada produksi hasil pertanian. Disamping itu juga akan timbul masalah lingkungan alam seperti pencemaran tanah dan air.

Untuk meminimalkan dampak negatif yang timbul akibat pembangunan perumahan, sangat diperlukan peran pemerintah dalam mengatur tata guna lahan agar tercipta keseimbangan antara pemanfaatan dan daya dukung lingkungan yang tersedia. Perumahan dan fasilitas tempat tinggal merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan. Unsur-unsur rumah yang sering menjadi indikator perumahan adalah kualitas dan fasilitas bangunan.

5.1. Kondisi Perumahan

Dalam publikasi ini memaparkan beberapa informasi tentang perumahan seperti status penguasaan bangunan tempat tinggal, jenis atap terluas, jenis dinding terluas, luas lantai, sumber air minum, penggunaan fasilitas air minum, tempat pembuangan tinja, fasilitas tempat buang air besar dan sumber penerangan.

Gambar 5.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal Kabupaten Sabu Raijua, 2009

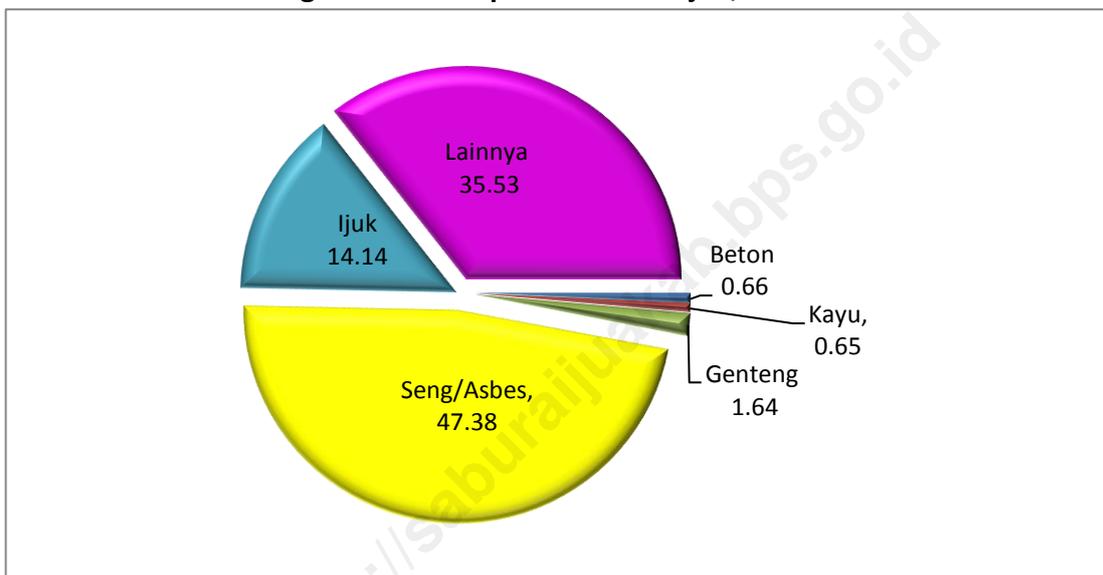


Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2009

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa sebagian besar status bangunan yang ditempati oleh rumah tangga adalah milik sendiri yaitu sebesar 91,78 persen, milik

orang tua/saudara sebesar 4,93 persen. Tingginya persentase status bangunan milik sendiri merupakan cerminan kondisi kehidupan masyarakat, dapat dikatakan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Sabu Raijua cukup baik dilihat dari aspek ini. Kondisi dan kualitas rumah yang ditempati dapat menunjukkan keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Semakin baik kondisi dan kualitas rumah yang ditempati dapat menggambarkan semakin baik keadaan sosial ekonomi suatu rumah tangga.

Gambar 5.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap yang Digunakan Kabupaten Sabu Raijua, 2009

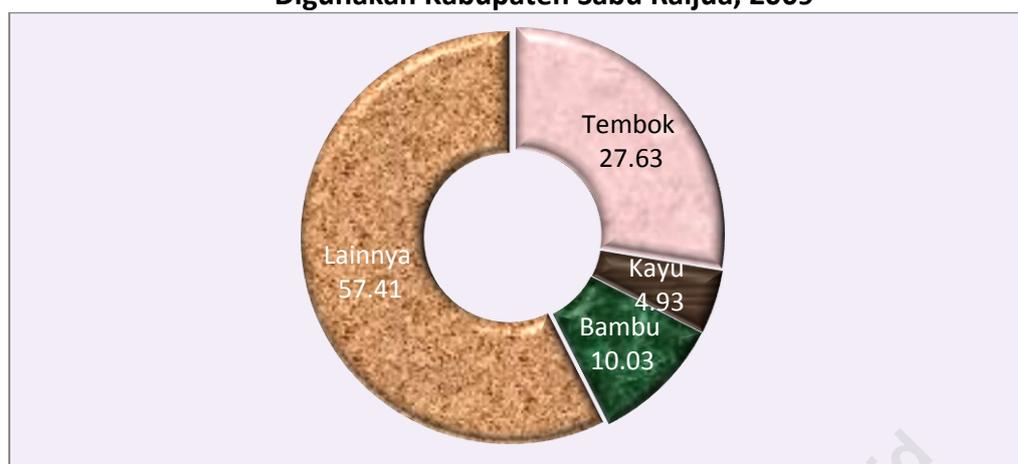


Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2009

Berdasarkan jenis atap, rumah tangga yang menggunakan seng mempunyai persentase tertinggi yaitu sebesar 47,38 persen. Rumah tangga yang menggunakan ijuk/rumbia relatif banyak sebesar 14,14 persen sedangkan rumah tangga yang menggunakan genteng masih sangat rendah hanya sebesar 1,64 persen.

Berdasarkan jenis lantai, rumah tangga yang mempunyai lantai tanah masih cukup tinggi yaitu sebesar 53,62 persen. Dilihat berdasarkan jenis dinding yang menggunakan tembok sebagai pelindung dinding rumahnya masih sebesar 27,63 persen.

Gambar 5.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding yang Digunakan Kabupaten Sabu Raijua, 2009



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2009

Luas lantai suatu bangunan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Luas lantai bangunan tempat tinggal penduduk Kabupaten Sabu Raijua pada umumnya berkisar antara 20 hingga 49 m² dimana persentasenya mencapai 61,51 persen. Rumah yang memiliki luas lantai antara 50 hingga 99 m² memiliki persentase sebesar 29,44 persen, luas lantai antara 100 hingga 149 m² sebesar 1,48 persen, luas lantai diatas 150 m² hanya 0,33 persen dan sisanya yaitu sebesar 7,24 persen merupakan bangunan dengan luas lantai kurang dari 20 m².

Tabel 5.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai di Kabupaten Sabu Raijua, 2009

Luas Lantai (m ²)	Persentase
(1)	(2)
< 20	7,24
20-49	61,51
50-99	29,44
100-150	1,48
> 150	0,33

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2009

5.2. Fasilitas Bangunan

Indikator-indikator fasilitas perumahan meliputi rumah tangga pengguna sarana air bersih, fasilitas pembuangan tinja, serta jarak pembuangan tinja dengan rumah. Indikator-indikator tersebut disamping sebagai salah satu penunjang tingkat sosial ekonomi, juga berkaitan erat dengan masalah kesehatan lingkungan.

Tingkat kesejahteraan rumah tangga juga tercermin dari kualitas air minum yang dikonsumsi. Air yang dikonsumsi berpengaruh pada kesehatan, karena itu penyediaan air bersih perlu mendapat perhatian serius. Air yang tergolong bersih adalah yang bersumber dari leding, pompa, sumur terlindung, mata air terlindung. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sebesar 50,32 persen ini berarti masih ada sekitar 49,68 persen yang mengkonsumsi air tidak bersih.

Tabel 5.2. Persentase Penggunaan Fasilitas Air Minum oleh Rumah Tangga Kabupaten Sabu Raijua, 2009

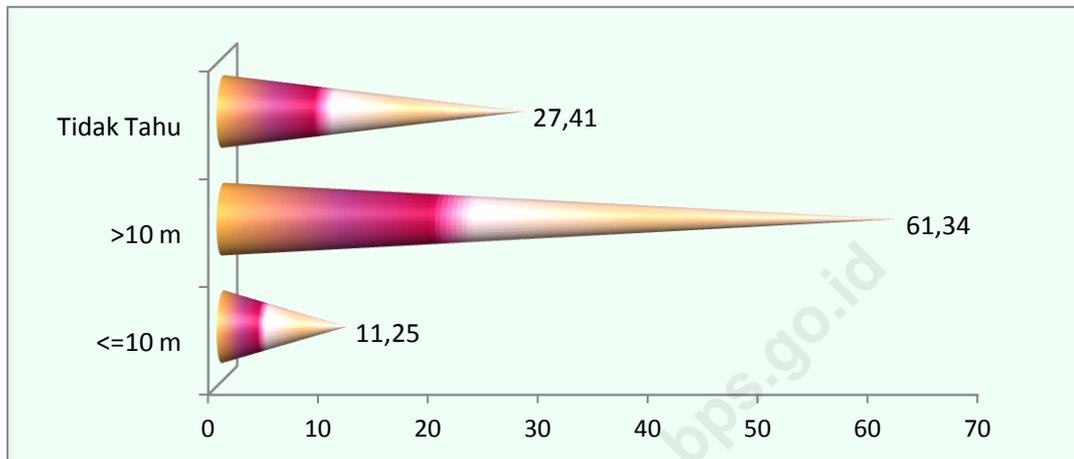
Fasilitas Air Minum	Persentase
(1)	(2)
Air isi ulang	0,82
Leding meteran	0,99
Leding eceran	3,78
Sumur bor/pompa	3,95
Sumur terlindung	25,32
Sumur tak terlindung	30,43
Mata air terlindung	15,46
Mata air tak terlindung	15,46
Air sungai	2,63
Air hujan	0,00
Lainnya	1,15

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2009

Jarak tempat penampungan kotoran dari sumber air minum yang berasal dari pompa, sumur dan mata air juga harus diperhatikan, karena hal ini juga mempengaruhi tingkat kesehatan rumah tangga. Jarak penampungan dengan sumber air minum yang sangat dekat memungkinkan terjadinya perembesan air dari

penampungan kotoran terhadap air minum, sehingga kualitas air untuk keperluan sehari-hari tidak memenuhi syarat kesehatan.

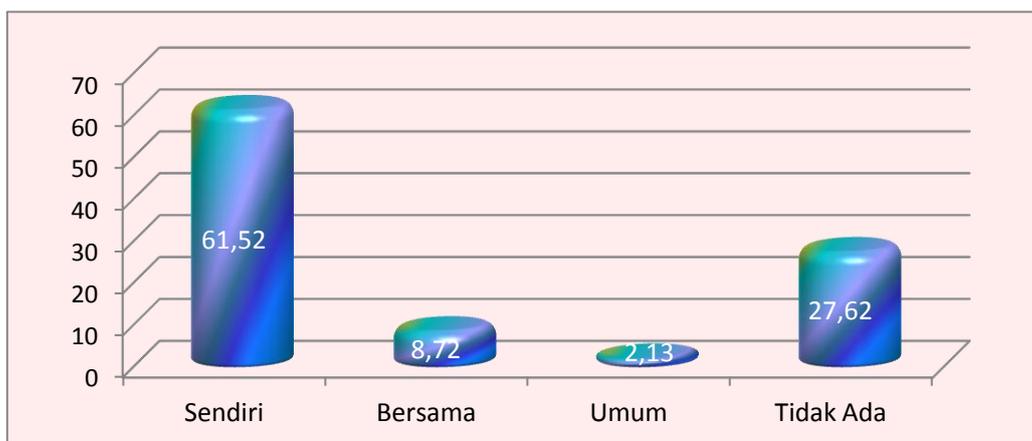
Gambar 5.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Kabupaten Sabu Raijua, 2009



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2009

Pada gambar 5.5 di atas terlihat bahwa sebagian besar rumah tangga jarak sumber air minum ke tempat penampungan kotoran lebih dari 10 meter yaitu sebesar 61,34 persen. Sedangkan jarak sumber air minum yang kurang dari 10 meter dan tidak tahu berturut-turut mempunyai persentase 11,25 persen dan 27,41 persen.

Gambar 5.5. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Pemilikan Sarana Pembuangan Tinja Kabupaten Sabu Raijua, 2009



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2009

Untuk fasilitas lainnya yaitu status kepemilikan sarana pembuangan tinja sebesar 61,52 persen penduduk Kabupaten Sabu Raijua telah memiliki sendiri sarana pembuangan tinja, kemudian sebesar 8,72 persen rumah tangga memanfaatkan sarana tersebut secara bersama, dan 4,95 persen merupakan sarana milik umum. Yang menarik adalah persentase rumah tangga yang belum dilengkapi dengan sarana pembuangan tinja, persentasenya masih cukup banyak yaitu sebesar 27,62 persen.

Tabel 5.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja Kabupaten Sabu Raijua, 2009

Tempat Pembuangan Akhir Tinja	Persentase
(1)	(2)
Tangki/spal	7,73
Kolam/sawah	0,49
Sungai/danau/laut	0,00
Lobang tanah	64,15
Pantai/tanah lapang/kebun	20,55
Lainnya	7,07

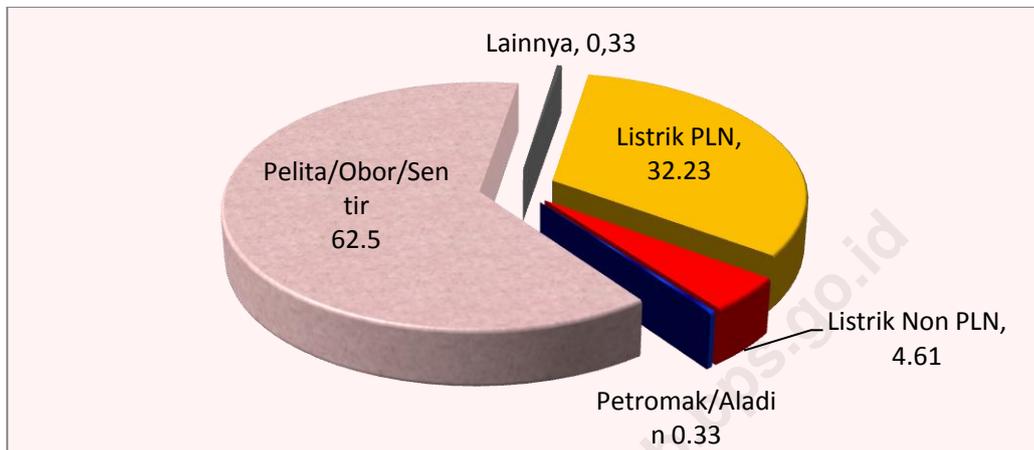
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2009

Pada tabel 5.3 di atas terlihat bahwa rumah tangga dengan tempat pembuangan akhir tinja tangki septik sebesar 7,73 persen. Namun, masih banyak juga rumah tangga yang pembuangan akhir tinja di pantai/tanah lapang/kebun yaitu sebesar 20,55 persen. Hal ini menjadi salah satu cerminan bahwa sistem sanitasi penduduk relatif buruk, selain itu hal tersebut mengakibatkan kondisi lingkungan perumahan penduduk menjadi tidak sehat.

Listrik merupakan sumber penerangan yang mempunyai nilai paling tinggi dibandingkan dengan penerangan petromak, pelita dan sumber penerangan lainnya. Hal ini disebabkan karena listrik lebih praktis dan modern, serta tidak menimbulkan

polusi. Rumah tangga yang menggunakan listrik dianggap mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

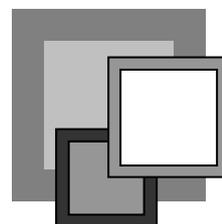
Gambar 5.6. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Kabupaten Sabu Raijua, 2009



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2009

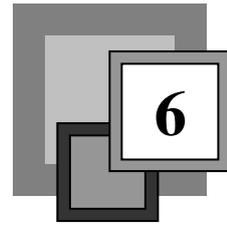
Secara umum, sebagian besar rumah tangga belum menggunakan listrik baik yang berasal dari PLN maupun non PLN. Rumah tangga yaitu yang menggunakan listrik PLN sebesar 32,23 dan listrik non PLN sebesar 4,62 persen. Namun yang masih menggunakan pelita/sentir/obor masih cukup besar yaitu sebesar 62,5 persen, yang menggunakan petromak/aladin dan lainnya berturut-turut sebesar 0,33 persen dan 0,33 persen.

PENGELUARAN



<http://saburpajuakab.bps.go.id>

PENGELUARAN RUMAH TANGGA



Tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat dilihat dengan jelas melalui besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga tersebut. Pendekatan yang biasa diambil adalah pendekatan pengeluaran rumah tangga, sebab data pendapatan yang akurat sulit untuk diperoleh, kemampuan membayar dapat menjadi indikator besarnya pendapatan perkapita.

Semakin tinggi pengeluaran penduduk baik untuk konsumsi makanan maupun non makanan mengindikasikan bahwa pendapatan penduduk tersebut juga semakin tinggi. Hal tersebut dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk yang bersangkutan.

6.1. Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan

Mengingat bahwa tingkat pendapatan penduduk sangat bervariasi, maka dalam tabulasi pada tahun 2009 pengelompokan pengeluaran perkapita sebulan digolongkan dalam delapan golongan seperti terlihat pada tabel 6.1.

Di Kabupaten Sabu Raijua jenis pengeluaran perkapita sebulan yang terbesar terdapat pada golongan pengeluaran Rp.200.000,- hingga Rp.299.999,- yaitu sekitar 29,24 persen. 28,85 persen berada pada golongan pengeluaran Rp.150.000,- hingga Rp.199.999,-. Sementara persentase terkecil terdapat pada golongan pengeluaran kurang dari Rp.100.000,-. Distribusi persentase pengeluaran perkapita sebulan di Kabupaten Sabu Raijua dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1. Persentase Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan menurut Golongan Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Kabupaten Sabu Raijua, 2009

Golongan Pengeluaran (Rp)	Persentase
(1)	(2)
< 100.000	2,9
100.000 – 149.999	18,46
150.000 – 199.999	28,85
200.000 – 299.999	29,24
300.000 – 499.999	15,61
> 500.000	4,93
Total	100

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2009

D A T A

MENCERDASKAN BANGSA



**Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kupang
Jl. El Tari II Kupang
Telp/Fax : (0380) 824432
Homepage: <http://ntt.bps.go.id/kab-kupang>
Email : bps5303@mailhost.bps.go.id**